

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi terbentuknya *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region* dalam upaya kerjasama untuk menangani permasalahan sampah laut di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis menggunakan deskriptif analisis. Penulis meneliti permasalahan ini dengan menggunakan teori *transboundary policy problem* yaitu melihat pengaruh sampah laut yang merupakan masalah lintas batas, dan teori Institusional Kerjasama untuk melihat dasar terbentuknya Deklarasi Bangkok dalam penyelesaian masalah sampah laut di Asia Tenggara. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 hal utama yang melatarbelakangi terbentuknya Deklarasi Bangkok tentang permasalahan sampah di kawasan ASEAN, yaitu ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara individu dan adanya tindakan kolektif dari masing-masing negara secara rasional untuk mencapai tujuan negara dalam penyelesaian permasalahan sampah laut.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa isu *transboundry problem* merupakan masalah lintas batas dimana kebijakan suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya. Negara-negara ASEAN belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah laut secara individu dikarenakan negara-negara berkembang di ASEAN belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan sampah plastik dan rendahnya sumber daya masyarakat tentang bahayanya sampah plastik, sehingga dibutuhkan kerjasama Institusional untuk melakukan tindakan kolaboratif dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara mendeklarasikan untuk bersama-sama memerangi sampah laut sehingga terbentuklah *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region*. Dalam deklarasi tersebut, negara di dorong untuk menciptakan atau mengadopsi kebijakan yang telah di sepakati oleh rezim tersebut.

Kata Kunci: Deklarasi, Bangkok, Kerjasama, Sampah Laut, ASEAN

ABSTRACT

This study aims to explain what is behind the formation of the Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region in a collaborative effort to deal with the problem of marine debris in the Southeast Asian region in 2019. The research method used is a qualitative approach with literature study data collection techniques and analysis using descriptive analysis. The author examines this problem using the theory of transboundary policy problems, which looks at the influence of marine debris which is a transboundary problem, and the theory of Institutional Cooperation to see the basis for the formation of the Bangkok Declaration in solving the problem of marine debris in Southeast Asia. This research found that there are 2 main things behind the formation of the Bangkok Declaration on the problem of garbage in the ASEAN region, namely the inability of countries to solve the problem individually and the collective action of each country rationally to achieve the country's goals in solving the marine debris problem.

From this research, it can be seen that the issue of transboundary problems is a cross-border problem where one country's policies can affect other countries. ASEAN countries have not been able to solve the problem of marine debris individually because developing countries in ASEAN do not have adequate facilities and infrastructure for processing plastic waste and low community resources about the dangers of plastic waste, so institutional cooperation is needed to take collaborative action with other countries. Therefore, countries declared to jointly fight marine debris so that the Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region was formed. In the declaration, countries are encouraged to create or adopt policies that have been agreed upon by the regime.

Keywords: Declaration, Bangkok, Cooperation, Marine Debris, ASEAN